

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII DI KOTA PALEMBANG

Yuliana¹, Desi Rahmawati², Ricih³, Rusmiyati⁴, Yeni Susanti⁵

¹⁾ Dosen pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

^{2),3),4),5)} Mahasiswa pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang

Email: yuli_72@unisti.ac.id¹, agatacie@yahoo.co.id², ricih32@gmail.com³, rusmiyati598@gmail.com⁴, yennisusanti996@gmail.com⁵

ABSTRACT

Development in the current era has used a community empowerment approach. One of the development programs that uses an empowerment approach is the Program for the Acceleration of Improved Irrigation Water Use (P3-TGAI) which is a program of the Ministry of PUPR in an effort to improve the economy and community welfare through empowering farming communities. The program was implemented by building an irrigation canal in Pulokerto Village, Gandus District, Palembang City. The research method used in this study is a qualitative method. Collecting data by interview and observation. This research is directed to be able to know, understand about and describe the actual situation in the field in detail and actual regarding the Implementation of the Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Use (P3-TGAI) according to SE No. 02/SE/D/2020. The results showed that the activities of the Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Use in Pulokerto Village, Palembang City were in the form of a project that had several stages, namely preparation, planning, implementation, monitoring, evaluation and delivery of program results. Factors that support this program are community assistance staff, adequate location, mutual cooperation, and the role of the government. Factors hampering the difficulty of getting to the location, slow disbursement of funds, lack of public knowledge about the P3-TGAI Program, and weather factors. The results of the P3TGAI program are handed over to the community in the form of irrigation canals that are carried out by WUA and the local community.

Keywords: P3-TGAI Program, Policy implementation

ABSTRAK

Pembangunan pada era sekarang telah menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Kementerian PUPR dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani. Program terlaksana dengan membuat Saluran Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara serta observasi. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami tentang serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai SE No.02/SE/D/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang berupa proyek yang terdapat beberapa tahap yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta penyerahan hasil program. Faktor yang mendukung program ini adalah tenaga pendamping masyarakat, lokasi yang memadai, gotong royong, peran pemerintah. Faktor pengambatan sulitnya menuju lokasi, lambatnya pencairan dana, kurang pengetahuan masyarakat mengenai Program P3-TGAI, serta faktor

cuaca. Hasil program P3TGAI diserahkan kepada masyarakat berupa saluran irigasi yang dikerjakan oleh P3A dan masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Program P3-TGAI, Implementasi kebijakan*

A. PENDAHULUAN

Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Indonesia adalah Negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung sektor tersebut antara lain tentang pengelolaan sistem irigasi ditingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Kedua landasan tersebut, ditekankan bahwa “pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab pengembangan dan pemakaian air”. Hal ini berarti segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai air (pada beberapa daerah terkenal dengan mitra Cai, Subak, HIPPA, Dharma Tirta) termasuk perkumpulan petani pemakai air tanah/ P3A.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pemasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberi upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama diantara musim tanam dan panen. Agar program terlaksana dengan baik maka dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pelaksanaan pekerjaan dengan maksud agar hasil pelaksanaan program dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus dan lokasi penelitian adalah P3-TGAI perkotaan yang dilaksanakan di Kecamatan Gandus Kota Palembang. Pertimbangannya adalah program yang dilaksanakan dilokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang terkait dengan Program Percepatan Peningkatan

Tata Guna Air Irigasi dan lokasi tersebut juga baru pertama kali mendapatkan bantuan Program irigasi dari pemerintah.

Di Kota Palembang Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus yang mendapatkan bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Terdapat lokasi yang mendapatkan Program tersebut yaitu Sungai Rengas dengan membentuk kelompok kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dengan panjang saluran tersier yang akan dikerjakan oleh P3A Maju Bersama sepanjang \pm 900 meter, lebar saluran \pm 8cm dan tinggi \pm 60 cm. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan masih ada kendala atau permasalahan yang terjadi antara lain, kurangnya aliran air untuk menuju area persawahan, masih kurang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan saluran irigasi, sebagian besar masyarakat belum memahami arti pentingnya saluran irigasi untuk lahan pertanian. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Di Kota Palembang”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

1.1 Pengertian dan Perspektif

Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, 2002:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Adapun pengertian implementasi kebijakan oleh Wahab (2005:42) adalah sebagai berikut: “Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan.

Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.”

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik.

1.2. Faktor Determinan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Tahap pelaksanaan proses kebijakan pada dasarnya adalah fase operasional di mana kebijakan yang sebenarnya diterjemahkan ke dalam tindakan dengan harapan dapat memecahkan beberapa masalah publik. Theodoulou & Kofinis (2005: 183) mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dipercaya secara berkelanjutan dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari implementasi kebijakan publik. Ketiga tantangan tersebut adalah: (1) *Clarity of policy goals*, (2) *Information intelligence*, dan (3) *Strategic planning*

Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab mengajukan enam faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah (1) Standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Disposisi pelaksana, (6) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik. (Wahab, 2005: 79).

2. Program P3-TGAI

2.1 Pengertian Irigasi

Menurut Gandokesuma (1981:9) Irigasi adalah usaha untuk mendatangkan

air dengan membuat bangunan dan saluran untuk mengalirkan air guna untuk keperluan pertanian, membagikan air ke sungai atau ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak digunakan lagi, setelah digunakan air semuanya mengambil tindakan untuk melakukan pembatasan dan pengambilan air kesumbernya dibawah ketempat dimana air yang dibutuhkan atau diperlukan untuk membagikan kepada tanaman yang membutuhkan. Selain itu menurut Suharjo (1994) irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendung yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan air bawah tanah.

2.2 Tujuan dan Manfaat Irigasi

Adapun tujuan irigasi, diantaranya yaitu membasahi tanaman, merabuk, untuk mengatur suhu, untuk membersihkan tanah atau memberantas hama yang berada dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman, untuk kolmatase, untuk menambah persediaan air tanah.

Adapun manfaat Irigasi, diantaranya yaitu untuk menambahkan air ke dalam tanah guna menyediakan cairan yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek, untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, untuk

mencuci dan mengurangi garam tanah, untuk mengurangi bahaya erosi tanah, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.

2.3 Jenis-Jenis Irigasi

Berikut macam-macam jenis irigasi diantaranya yaitu *irigasi permukaan*, *irigasi pompa air*, irigasi gravitasi, *irigasi penyemprotan (sprinkler irrigation)*, *irigasi tanah kering atau irigasi tetes (trickle irrigation)*.

2.4. Program Pembangunan

Menurut Katz dalam Yuwono (2001), definisi pembangunan secara sederhana adalah proses perubahan dari suatu keadaan lain yang lebih baik. Pembangunan nasional dilaksanakan pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu sektor yang perlu dibenahi adalah sektor pertanian. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dengan anggaran murni APBN adalah dengan adanya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1991 tentang rawa, pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa di tingkat tersier menjadi tugas penanggung jawab masyarakat pemakai air bersangkutan.

Untuk mewujudkan maksud tersebut serta terjaganya kelestarian kondisi dan fungsi prasarana tersebut para petani pemanfaat air, jaringan irigasi dan jaringan reklamasi rawa telah sepakat untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), sebagai wadah atau organisasi yang bersifat sosial dan secara organisasi, teknik dan finansial mampu melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Wadah atau perkumpulan tersebut diharapkan dapat menampung kegiatan dan kepentingan bersama serta mempersatukan para petani atau kelompok petani guna memudahkan pembinaan dan menggerakkan partisipasinya dalam pembangunan pengairan dan pertanian khususnya serta pembangunan desa pada umumnya.

2.5. Kebijakan Pembangunan

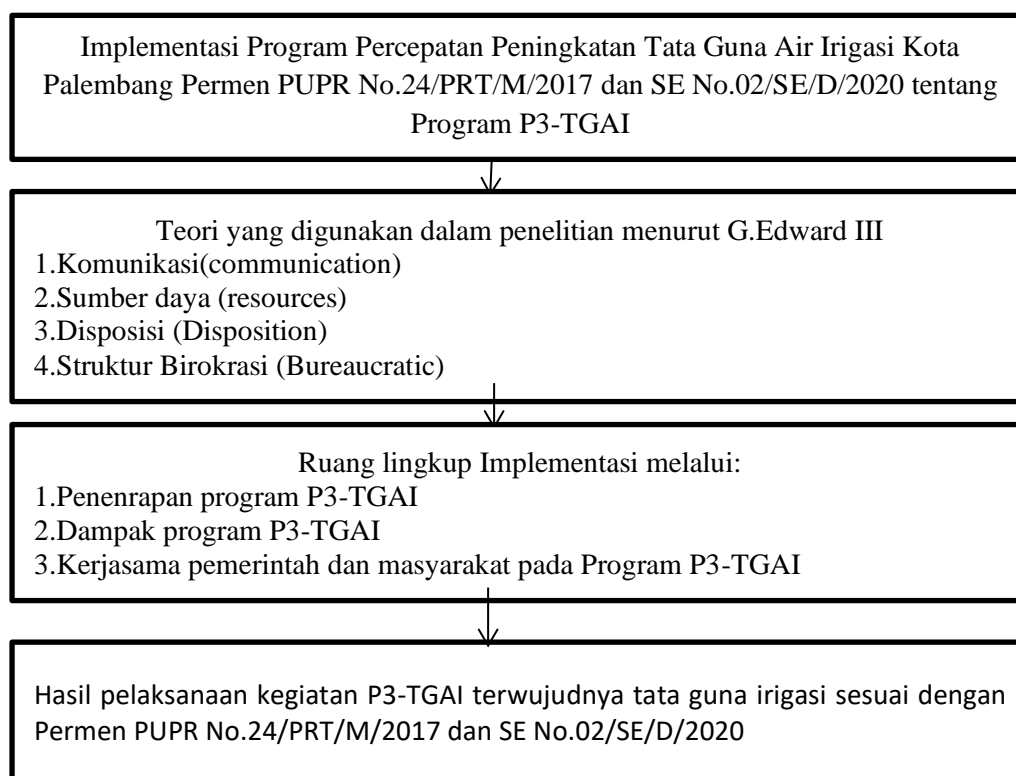
Kebijakan pemerintah yang meningkatkan anggaran belanja negara dalam pembangunan ekonomi diharapkan dapat mengurangi laju pengangguran dan kemiskinan dan memfokuskan pengeluaran pada sektor-sektor padat karya. Berbagai upaya kebijakan pembangunan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi

budaya dan politik. kebijakan padat karya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak dapat bekerja di pedesaan maupun diperkotaan dikarenakan ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan padat karya meskipun sampai sekarang hanya diberlakukan pada daerah-daerah tertentu. Padat karya juga diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang mandiri dengan dan diharapkan adanya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kegiatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) merupakan pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersier yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama diantara dua musim tanam dan panen.

2.6. Prinsip dan Pendekatan

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dilaksanakan berdasarkan prinsip (1)Partisipasi, (2)Transparansi, (3)Akuntabilitasi, (4)Berkesinambungan

3.Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Model Kerangka Berpikir Penelitian

2.7. Objek P3-TGAI

Perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan pada (1) Daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/ atau irigasi desa; atau (2) Jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (bukan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005)..

Fokus penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi P3-TGAI. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Informan kunci adalah

Kepala BBWS Sumatera VIII, Satker Operasi Dan Pemeliharaan S VIII, Pejabat Pembuat Komitmen, Koordinator Konsultan Manajemen Balai (KMB) sedangkan informan pendukung adalah 3 orang yaitu Camat Gandus, Lurah Pulokerto, Ketua P3A Maju Bersama Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ,yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi.

Lokasi penelitian ini diadakan di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang lokasinya di Sungai Rengas dengan waktu penelitian selama 7 bulan dimulai pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

Dalam konteks Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang

dilaksanakan di kecamatan Gandus, upaya menumbuhkan pemahaman mengenai Program tersebut dan tujuan yang diinginkan melalui sosialisai hal ini terkait dengan perencanaan atau input kegiatan yaitu usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil dari Implementasi P3-TGAI termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, lokakarya. Sosialisai tersebut pada awalnya dilakukan kepada implementor, kemudian pemerintah setempat. Setelah kebijakan P3-TGAI disosialisasikan kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat memahami keberadaan program P3-TGAI dan mendapatkan respon positif mengenai kebijakan tersebut. Dengan adanya respon yang positif diharapkan adanya dukungan yang luas dari masyarakat dalam bentuk langkah nyata dan berperan secara aktif dalam program P3-TGAI yang telah direncanakan. Hal ini terkait terhadap respond dan dukungan yang nantinya menjadi manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya musyawarah dan mufakat masyarakat. Berikut uraian program P3-TGAI dalam aspek kelompok dan sasaran P3-TGAI secara sederhana pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Sasaran terhadap program P3-TGAI

No	Kegiatan	Target Program
1	Pelaksanaan	Perberdayaan

		masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program P3-TGAI
2	Dukungan/ Partisipasi dan target program P3-TGAI	-Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program relative tinggi baik dalam tahapan awal kegiatan, pembentukan organisasi pelaksana maupun realisasi pelaksanaan P3-TGAI -Bentuk target dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dengan terbentuknya P3A, pengelola kegiatan dan relawan setempat -Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan tenaga misalnya kerja bakti untuk pembersihan lahan irigasi yang akan dibangun
3	Manfaat program bagi individual	Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dan besar harapan

masyarakat penerima manfaat	masyarakat untuk program P3-TGAI dilanjutkan dan ditingkatkan lagi
-----------------------------	--

Sumber : hasil penelitian Bulan Juni 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan P3-TGAI relative tinggi, partisipasi tersebut dilakukan mulai dari awal kegiatan yaitu sosialisasi program, pembentukan P3A, pembuatan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan lainnya. Begitu pula pada manfaat program banyak dirasakan masyarakat akan tetapi masih ada proposal kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yg belum terealisasi karena keterbatasan dana pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

Dalam bahasan struktur organisasi peneliti akan menguraikan peran dan fungsi organisasi pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dengan memfokuskan pada Konsultan Manajemen Balai, yaitu TPM, Kades Fasilitator Kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI masyarakat dibantu tenaga pendamping yang disebut dengan TPM (Tenaga Pendamping Masyarakat). Tim TPM ini menyampaikan informasi program dan pendampingan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI membantu menyiapkan usulan

kegiatan, dan memantau pelaksanaan program P3-TGAI.

TPM diharapkan bertindak menjadi ujung tombak dalam pengembangan masyarakat yang mampu mengkondisikan masyarakat untuk melangkah dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI yang benar sesuai dengan visi misi P3-TGAI. Para fasilitator tersebut mempunyai keahlian yang terdiri dari bidang infrastruktur/ teknik, keuangan dan pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang dilakukan TPM memfasilitasi tahapan kegiatan P3-TGAI, kegiatan fasilitas tersebut mencakup semua tahapan kegiatan siklus P3-TGAI. P3-TGAI Kecamatan Gandus Kota Palembang memfokuskan pemberian bantuan bukan hanya sekedar program bagi-bagi uang kane tetapi berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat berdaya untuk memampukan dirinya bangkit dari kondisi yang kurang mampu atau tidak berdaya menjadi masyarakat yang mampu untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) bukan hanya berfokus pada program pembagian uang akan tetapi berupaya memberdayakan masyarakat (*community empowerment*) agar masyarakat dapat bangkit dari kondisi

kekurangan atau tidak berdaya menjadi masyarakat yang mampu berdaya atau bangkit dari kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan melalui tahapan program atau yang dikenal dengan siklus program pemberdayaan, yang pada dasarnya merupakan proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat.

Tujuan pemberdayaan itu sendiri adalah agar masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri mereka menuju ke keadaan yang lebih baik, mampu mengali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompok serta mampu meng eksistensikan diri secara jelas. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom of* yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan.

Wujud pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI untuk penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat, TPM dan P3-TGAI kota Palembang. Tahapan-tahapan

pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi terdiri atas:

- a. Penandatanganan pakta integritas dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Ketua P3A dengan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A dengan didampingi oleh TPM.
- d. Pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI dilakukan oleh P3A dengan didampingi Tenaga Pendamping. Hasil pelaporan dan dokumentasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Tahap pengawasan dan evaluasi

Model Edwards III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan P3-TGAI Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Di Kota Palembang. Faktor-Faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi (*Comunication*)

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Edward III bahwa komunikasi yang baik seharusnya berjalan dua arah hal ini penting dalam menjalankan implementasi. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi sudah berjalan dengan baik karena pihak-pihak yang terkait selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Program P3-TGAI.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat bahwa komunikasi yang dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi sudah sejalan dengan teori Edward III.

2. Sumber Daya

Beberapa hal yang terkait Sumber Daya ini antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program P3-TGAI yang pertama adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang mencangkupi dalam melaksanakan kegiatan. Semakin berkualitas Sumber Daya Manusia suatu organisasi semakin efektif suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan informasi didapat bahwa orang-orang yang

berperan sebagai Konsultan Manajemen Balai dan Tim Pendamping Masyarakat adalah orang yang terseleksi sehingga bisa lolos menjadi anggota tim. Mereka semua berpendidikan sarjana rata-rata masih usia produktif, sudah mengikuti pelatihan untuk program ini.

b. Sumber Dana

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Edward III bahwa Sumber Daya sebagai faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber Daya yang kompeten serta didukung dana, sarana dan prasarana yang ada merupakan satu kesatuan yang wajib ada dalam pelaksanaan Implementasi. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sumber Daya yang meliputi sumber daya manusia yang ada dalam Program ini sudah melalui tahap seleksi dan sudah kompeten dalam bidangnya, dan sumber dana yang ada di Program P3-TGAI merupakan dana yang didapat dari dana APBN murni. Berdasarkan hasil wawancara bahwa masih sering terjadi keterlambatan pencairan dana dikarenakan rekening yang sudah tidak aktif. Prasarana, sulitnya jangkauan untuk pengantaran bahan baku pembuatan jaringan irigasi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus disebabkan akses jalan masih tanah merah, apalagi jika

terjadi hujan daerah tersebut akan sangat sulit untuk dilewati.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat bahwa Sumber Daya yang dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi belum sejalan dengan teori Edward III.

3. Disposisi

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Edward III bahwa Disposisi yang baik apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa Disposisi yang dilakukan implementor ditunjukkan dengan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat bahwa disposisi yang dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi sudah sejalan dengan teori Edward III.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan informasi didapat bahwa komunikasi yang dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi sudah sejalan dengan teori Edward III.

Komunikasi yang baik yang dilakukan pihak-pihak terkait dengan

pelaksanaan Program P3-TGAI berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program. Pengertian dan pemahaman program baik dari Konsultan Manajemen Balai, Tenaga Pendamping Masyarakat, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Pemerintah Setempat dapat dilakukan karena adanya komunikasi yang baik. Ketersediaan Sumber Daya Manusia serta Dana Anggaran yang cukup untuk melaksanakan program menjadikan program berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap yang positif mengenai program yang sedang dijalankan mendorong pada pencapaian pelaksanaan yang lebih baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program P3-TGAI. Begitupula dengan dengan ketersediaan Struktur Birokrasi dengan adanya panduan SOP (*Standar Operating Procedure*) akan mempermudah dalam pelaksanaan program ini.

2.Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

Faktor pendukung yang menjadi tolak ukur pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi adalah:

- Lokasi yang mendapatkan bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi memang sudah sangat

layak karena sudah berada dilokasi pertanian;

- Di Kelurahan Pulokerto sudah terbentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bernama “P3A Maju Bersama” sehingga mempermudah pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
- Peran serta pemerintah setempat sangat mendukung adanya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
- Sumber Daya Manusia yang di gunakan di Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi ini sudah kompeten peraturan yang ditetapkan Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII;

Faktor penghambat yang ada di dalam pelaksanaan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi adalah:

- Sulitnya menuju lokasi dikarenakan jalannya yang masih tanah merah dan tidak bisa dilewati saat hujan sehingga bahan baku untuk pembuatan saluran irigasi sering terlambat sampai dilokasi;
- Pencairan dana yang terlambat dikarenakan rekening yang sudah tidak aktif mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan lapangan menjaadi tertunda;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi di Kota Palembang;

- Faktor cuaca yang kadang tidak mendukung mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan saluran irigasi;

Faktor pendukung dan penghambat diatas merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Adapun hasil dari Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi oleh BBWSS Sumatera VIII di Kota Palembang yang berupa saluran irigasi yang dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat setempat. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat merawat dan memelihara saluran irigasi yang sudah dibangun agar dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Di Kota Palembang dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik karena pihak-pihak yang terkait selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
2. Aspek Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia yang sudah baik karena

mereka melalui sistem seleksi, Sumber Dana yang di dapatkan pada Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) melalui dana APBN Murni.

3. Aspek Diposisi dijalankan dengan baik dan lancer sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
4. Aspek Struktur Birokrasi menggunakan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang dikeluarkan oleh Dirjen Sumber Daya Air Nomor.02/SE/D/2020.
5. Faktor Pendukung antara lain, lokasi yang layak karena sudah berada di lokasi pertanian, sudah terbentuknya P3A, peran pemerintah yang mendukung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Sumber Daya Manusia yang sudah kompeten.
6. Faktor Penghambat antara lain, sulitnya menjangkau lokasi dikarena masih tanah merah, pencairan dana yang masih terlambat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), cuaca yang tidak mendukung sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan saluran irigasi.

2. Saran

1. Penambahan dana anggaran untuk setiap kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mendapatkan bantuan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) agar dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi.
2. Tenaga Pendamping yang sudah berpengalaman sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebaiknya dipertahankan ketika program tersebut akan dilaksanakan kembali agar meminimalisir melakukan training ulang untuk tenaga pendamping.
3. Melibatkan Lurah, ketua RT/RW atau pejabat setempat menjadi penasehat P3A sebagai motivator dan fasilitator program agar dapat ikut berperan serta dalam melaksanakan pembangunan wilayah mereka.
4. Penambahan wilayah untuk mendapatkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Kota Palembang agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup diperkotaan dan memberikan peluang kerja untuk para mahasiswa yang baru selesai dari pendidikan kesarjanaaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bouman, B.A.M. 2003. *Examining the Water Shortage Problem in Rice System, Water Saving Irrigation Technologies. Science Innovation and Impact for Livelihood, IRR: 519-535.*
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall*
- Edward III, 1984. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press
- Fauzyah Rahmah, Ari Subowo, 2015. *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.*
- Grindle, Merilee S. 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third World, New jersey: Princetown University Press.*
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nurhasanah, 2019. *Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.*
- Pasandaran, E. 2005. *Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air. Analisis*

- Kebijakan Pertanian, Vol 3 No. 3, September 2005: 201-216*
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Soenarko. 2000. *Public Policy, Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintahan*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Sukuryadi. 2011. *Pengaruh Pembangunan Saluran Irigasi Terhadap Pendapatan Petani pada Usaha Padi Sawah di desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011*. Artikel Pendidikan Media Bina Ilmiah. Malang.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Wahab, Solichin A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin A. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi aksara
- Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo
- Widjaja, A.W dan M.Arisky Wahab, 1987. *Strategi Public Relations*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Univercity
- Peraturan dan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi, Pembangunan, Rehabilitasi, Operasi Dan Pemeliharaan Irigasi Ditingkat Usaha Tani
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang 2015 Tentang Rawa, Pembangunan, Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Di Tingkat Tersier
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
- Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 02/SE/D/2020 Tentang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi